



Judul : Tayangan tak sesuai norma, konten OTT disensor
Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 14

■ KONTEN DIGITAL

Tayangan Tak Sesuai Norma, Konten OTT Disensor

JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berencana mengatur pengawasan konten terhadap bisnis *streaming* film atawa *over the top* (OTT) seperti Youtube, Netflix dan lain-lain.

Sensor konten OTT perlu dilakukan untuk menjaga *digital culture* (budaya digital) dan *digital ethic* (etika digital) masyarakat Indonesia. Dua aspek itu yang menjadi perhatian Kemkominfo saat ini, termasuk dengan *digital*

skill (keterampilan digital) dan *digital security* (keamanan digital).

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono menyetujui rencana Kemkominfo. Menurut dia, hal ini perlu dilakukan mengingat banyaknya konten dewasa yang mendorong ideologi barat di bisnis OTT. 'Saya pribadi setuju, asal sanggup melakukannya,' kata dia, Rabu (23/8).

Dave meminta agar peraturan yang akan dibuat juga harus selaras dengan sejumlah

aturan yang sudah ada agar tidak ada tumpang tindih. Selain itu, pemerintah diharapkan membuat regulasi yang dapat disesuaikan dengan norma-norma hukum dalam menjaga kultur budaya Indonesia.

Kemkominfo akan segera mengumpulkan pemangku kepentingan untuk membahas rencana penyensoran konten di OTT, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Lembaga Sensor Film (LSF), pemain

OTT hingga lembaga yang bekerja sama dengan OTT.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Usman Kansong mengatakan, pihaknya telah menerima banyak aduan terkait tayangan di platform OTT yang tidak sesuai norma di Indonesia.

Selain itu, pihaknya mendapatkan protes dari asosiasi televisi yang merasa tidak mendapatkan keadilan terkait konten yang harus ditayangkan kepada publik. 'Karena

itu Kemkominfo mulai memikirkan bagaimana cara menanganinya dan memperlakukan konten atau film yang ada di platform OTT,' terang dia kepada KONTAN, kemarin.

Usman bilang, pihaknya akan melakukan kajian terkait dengan rencana pengawasan konten terhadap platform OTT bersama dengan pihak terkait. Kajian ini untuk memastikan agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan.

Lailatul Anisah